



Judul : Presiden Ingin RUU PPRT Segera Disahkan
Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 12

Presiden Ingin RUU PPRT Segera Disahkan

Pemerintah membentuk gugus tugas yang diketuai Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej untuk memuluskan pembahasan RUU dengan DPR.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah mangkrak 19 tahun lamanya bisa diselesaikan tahun ini. Kehadiran RUU itu akan memberikan perlindungan bagi para pekerja, pemberi kerja, dan penyalur kerja rumah tangga.

"Sudah lebih dari 19 tahun RUU PPRT ini belum disahkan, sementara hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur pekerja rumah tangga. Sekarang, RUU PPRT sudah masuk ke daftar prioritas 2023 dan saya rasa ini waktunya untuk kita memiliki UU PPRT," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengungkapkan selama ini pembahasan RUU PPRT berlarut-larut karena belum adanya komitmen kuat dari DPR. RUU tersebut memang datang dari tangan DPR. "Ini, kan, inisiatif DPR. Jadi, pemerintah menunggu," jelasnya.

Ia optimistis, dengan adanya pernyataan tegas dari Kepala Negara, pembahasan RUU PPRT

bisa berjalan cepat dan diselesaikan pada masa sidang tahun ini.

Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang juga berlarut-larut bisa selesai setelah Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi percepatan.

Selama ini pembahasan RUU PPRT berlarut-larut karena belum adanya komitmen kuat dari DPR.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PRT di Indonesia saat ini mencapai 4 juta orang. Mereka kerap kehilangan hak-hak sebagai pekerja karena tidak adanya payung hukum yang kuat yang melindungi profesi mereka.

Aturan tertinggi yang ada baru peraturan menteri ketenagakerjaan.

"RUU PPRT ini tidak hanya fokus pada perlindungan bagi pekerja rumah tangga, tetapi

juga ada aturan bagi pemberi kerja dan penyalur kerja," sebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Ia menyebutkan nantinya RUU tersebut akan mengatur banyak hal, terutama yang berkaitan dengan hak dan keselamatan, mulai upah, jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, serta tentunya perlindungan dari diskriminasi saat bekerja.

Pecahkan kebuntuan

Direktur Institut Sarinah, Eva Sundari, mewakili koalisi masyarakat sipil mengapresiasi Presiden Jokowi. Ia berharap, akan ada respons positif dari DPR ketika Jokowi sudah berfatwa.

Keseriusan Jokowi dianggap bisa memecahkan kebuntuan dari proses legislasi RUU PPRT di DPR, yang terjadi selama belasan tahun. "Kalau dibandingkan dengan TPKS, UU ini sangat minimalis dan tidak ada pidananya. Jumlah pasalnya juga lebih sedikit kalau dibandingkan dengan TPKS," ujarnya.

Pendiri organisasi khusus PPRT, Jala PRT, Lita Anggraini meminta pimpinan DPR untuk segera menindaklanjuti niat Presiden.

"Segera jadwalkan dalam rapat paripurna," seru Lita. (Fal/H-2)